

Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Edukasi Manajemen Ritel dalam Mendukung Program Satu Sarjana Satu Desa di Citeureup Kabupaten Bogor

Herdian Farisi¹, Rizky Muyasar², Nurhasan³, Hasanudin⁴, Syamsudin Baharsyah⁵, Eddy Suharso⁶, Muhammad Azharul Fahmi⁷, Risa Ayu Sekartaji Ramadhani⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Manajemen Ritel, Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi, Universitas Medika Suherman, Indonesia

Received : 16 Juli 2026, Revised : 27 Juli 2026, Published : 4 Agustus 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Hasanudin

E-mail: hasanudin@medikasuherman.ac.id

Abstrak

Keterbatasan wawasan aparatur mengenai manajemen niaga menghambat optimalisasi program Satu Desa Satu Sarjana dalam mendorong ekonomi lokal. Pengabdian ini bertujuan membangun kesadaran institusional mengenai urgensi pendidikan manajemen ritel serta merumuskan sinergi bersama sarjana pendamping. Metode yang digunakan adalah sosialisasi partisipatif yang dikombinasikan dengan sesi diskusi tanya jawab. Mitra pengabdian melibatkan 20 orang yang terdiri dari perangkat desa, pengelola BUMDes, dan kader pemberdayaan di Kecamatan Citeureup. Evaluasi program dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan keterlibatan aktif audiens serta analisis kualitatif terhadap perubahan persepsi peserta. Hasil pengabdian menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma yang fundamental, aparatur desa kini mengonfirmasi pentingnya literasi niaga modern dan menyepakati komitmen bersama untuk memajukan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program daerah yang semula dianggap beban administratif guna program sarjana satu desa berhasil diubah menjadi peningkatan SDM di wilayah Kecamatan Citeureup dengan mempelajari manajemen ritel, sehingga menjadi aset strategis untuk menggerakkan unit usaha desa, sekaligus meningkatkan kesiapan birokrasi dalam menyerap keilmuan ritel terapan guna mendorong nilai ekonomis pedesaan.

Kata kunci – Ekonomi Pedesaan, Manajemen Ritel, Perangkat Desa, Satu Desa Satu Sarjana, Sinergi

Abstract

The limited knowledge of local government officials regarding business management hinders the optimization of the One Village, One Graduate program in boosting the local economy. This community service initiative aims to build institutional awareness regarding the urgency of retail management education and to establish synergies with the assigned graduates. The method used was participatory outreach combined with question-and-answer discussion sessions. The outreach partners consisted of 20 people, including village officials, BUMDes managers, and empowerment cadres in Citeureup Subdistrict. Program evaluation was conducted descriptively through observation of the audience's active engagement and qualitative analysis of changes in participants' perceptions. The results of the community service program indicate a fundamental paradigm shift; village officials now acknowledge the importance of modern business literacy and have agreed on a shared commitment to advancing human resource development initiatives. The regional program, which was initially viewed as an administrative burden for the One Village, One Graduate initiative, was successfully transformed into a human resource development initiative in the Citeureup Subdistrict by incorporating retail management

training. This has become a strategic asset for driving village business units while enhancing the bureaucracy's readiness to adopt applied retail knowledge to boost rural economic value.

Keywords - One Village One Graduate, Retail Management, Rural Economy, Synergy, Village Officials

How To Cite : Farisi, H., Muyasar, R., Nurhasan, N., Hasanudin, H., Baharsyah, S., Suharso, E., Fahmi, M. A., & Ramadhani, R. A. S. (2026). Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Edukasi Manajemen Ritel dalam Mendukung Program Satu Sarjana Satu Desa di Citeureup Kabupaten Bogor . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 6374 - 6382 1. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1622>

Copyright ©2026 Herdian Farisi, Rizky Muyasar, Nurhasan Nurhasan, Hasanudin Hasanudin, Syamsudin Baharsyah, Eddy Suharso, Muhammad Azharul Fahmi, Risa Ayu Sekartaji Ramadhani

PENDAHULUAN

Pembangunan desa masuk dalam daftar prioritas utama Nawacita, tepatnya pada butir ketiga yang ingin memperkuat desa sebagai fondasi negara kesatuan lewat pendekatan pembangunan dari pinggiran. Dalam hal ini, desa ditempatkan sebagai garda terdepan pembangunan (Sugianto & Siagian, 2023). Konsekuensinya, orientasi pembangunan yang dulu lebih terpusat di kota-kota besar sekarang bergeser ke arah pemberdayaan ekonomi lokal di tingkat desa (Syahza et al., 2013). Pemerintah pun didorong untuk mempercepat pembangunan di perdesaan, terutama di wilayah yang masih tertinggal (Handoyo et al., 2021). Penguatan ekonomi domestik desa tidak lagi bisa dikelola dengan cara konvensional yang mengandalkan intuisi semata, melainkan harus ditopang oleh kesadaran akan pentingnya tata kelola niaga yang terstruktur melalui pendidikan di bidang manajemen ritel modern, di mana manajemen pada dasarnya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien (Hasibuan et al., 2022).

Menyikapi fenomena ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menelurkan kebijakan strategis melalui program Satu Desa Satu Sarjana yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul di setiap desa sebagai agen perubahan dan jembatan inovasi bagi masyarakat desa, yang dimulai secara masif pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan program ini berjalan sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari pinggiran, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan (Pemerintah Kabupaten Bogor, 2025). Keberadaan para sarjana ini diharapkan mampu merombak pola pikir dan meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola potensi ekonomi daerahnya. Hal ini sejalan dengan temuan Fauzan et al. (2020) bahwa setiap desa dengan karakteristik uniknya dapat menjadi produk desa unggulan dengan potensi daya saing tinggi, jika ada pembinaan yang terencana dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan desa.

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai wilayah dengan dinamika ekonomi yang kompleks akibat posisinya yang berbatasan langsung dengan kawasan industri dan permukiman padat, menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Keterbatasan akses terhadap pengetahuan manajemen usaha modern menjadi hambatan struktural yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di pedesaan. Banyak staf kantor desa dan pengelola unit usaha lokal yang belum memiliki pemahaman konseptual mengenai pentingnya mempelajari dasar-dasar keilmuan ritel, seperti memahami konsep dasar pemasaran yang meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, pertukaran, transaksi, dan pasar (Hasibuan et al., 2022). Padahal, UMKM dapat memperkuat ketahanan mereka dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemakmuran ekonomi masyarakat (Fridayani et al., 2024). Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi salah satunya membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk unggul (Hasanudin & Rizky, 2026). Akibatnya, fungsi pendampingan ekonomi produktif masyarakat desa belum berjalan secara optimal.

Peran UMKM dalam perekonomian daerah sebenarnya sangat vital. Sayangnya, di lapangan sektor ini justru kerap tersingkir oleh dominasi ritel modern dan arus globalisasi (Lean et al., 2024). Pemerintah sebenarnya sudah berupaya melindungi mereka lewat kebijakan TOMIRA (Toko Milik Rakyat), yang mewajibkan ritel modern memajang dan menjual produk lokal minimal 30%. Namun nyatanya, kebijakan ini belum mampu mendorong produktivitas, pendapatan, maupun daya saing UMKM secara berarti. Hal ini menegaskan krusialnya dukungan serta evaluasi kebijakan pemerintah yang lebih taktis untuk mentransformasi UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang tangguh (Lean et al., 2024). Lebih lanjut, Alam (2025) mengonfirmasi bahwa Pusat Pembelajaran

muncul ketika perencanaan diperlakukan sebagai proses pembelajaran kolektif, yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pembelajaran antar sesama (*peer learning*), dan inovasi yang berakar pada lokal, sementara perencanaan yang didominasi oleh kelompok elit justru membatasi proses pembelajaran serta hasil pembangunan itu sendiri. Studi tersebut berkontribusi dengan merekonseptualisasikan Pusat Pembelajaran Intensif (*Learning Hot Spots*) sebagai suatu lingkungan pembelajaran kelembagaan yang tertanam kuat dalam perencanaan inklusif, sekaligus menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan perencanaan inklusif, pembelajaran kolektif, dan inovasi tata kelola untuk mendorong pembangunan pedesaan yang tangguh.

Dalam konteks ini, keberhasilan program pemberdayaan serupa terbukti mampu mengoptimalkan visibilitas produk, efisiensi proses produksi, serta kesiapan manajerial pelaku usaha dalam menembus pasar yang lebih luas, di mana melalui pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan, model penguatan ini diproyeksikan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain guna memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif, sekaligus memberikan sumbangsih praktis bagi strategi pengembangan komoditas lokal yang adaptif terhadap karakteristik daerah serupa (Maulana et al., 2025). Industri ritel sendiri merupakan salah satu industri yang paling dibutuhkan masyarakat, dan hal ini dibuktikan dengan menjamurnya toko-toko modern dengan jaringan di berbagai daerah serta telah menembus pasar media online (Mukti et al., 2023). Sinergi peran pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat memperkuat kepercayaan masyarakat desa dalam memprioritaskan pengembangan UMKM desa (Fauzan et al., 2020).

Melalui strategi pemberdayaan yang efektif seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia lewat pelatihan teknis, pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan, masyarakat diarahkan untuk mampu mengelola potensi ekonomi secara mandiri. Di samping itu, penyediaan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, yang diperkuat oleh kelembagaan ekonomi lokal serta kolaborasi multisektor, terbukti tidak hanya meningkatkan kemandirian finansial tetapi juga membangun struktur sosial kelembagaan yang kuat dan tangguh di tingkat tapak (Setyawan et al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, implementasi program edukasi yang terfokus pada kecakapan manajemen dan tata kelola keuangan terbukti mampu mengoptimalkan efisiensi operasional lembaga ekonomi pedesaan, sekaligus mengonversi komoditas domestik menjadi sektor usaha yang bernilai jual tinggi melalui kemitraan kolaboratif yang terintegrasi antara masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor industri (Supratiwi et al., 2025). Dalam konteks penguatan ekosistem tersebut, pemerintah harus meningkatkan kebijakan, meningkatkan kapasitas manajemen, dan melindungi BUMDes dari persaingan yang merugikan karena BUMDes memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa berdasarkan potensi lokal (Satoto et al., 2024). Lebih lanjut, Maryanti et al. (2023) menyajikan inisiatif pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai pusat distribusi produk lokal untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar produk UMKM.

Namun demikian, kesenjangan implementasi masih terjadi antara ketersediaan program pendidikan formal seperti Satu Desa Satu Sarjana dengan kebutuhan terapan di lapangan, khususnya dalam bidang manajemen ritel yang menjadi tulang punggung distribusi produk desa. Perangkat desa dan kader penggerak, sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus fasilitator pemberdayaan ekonomi, kerap mengalami keterbatasan wawasan akademis dalam melihat potensi ritel sebagai sektor strategis. Banyak kasus menunjukkan bahwa pejabat pemerintah desa memiliki kapasitas yang sangat terbatas dalam memberdayakan masyarakatnya, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah dan pengalaman yang terbatas (Nawawi et al., 2023). Manajemen pemasaran, yang didefinisikan sebagai analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan, menjadi ilmu yang krusial untuk dipelajari (Hasibuan et al., 2022). Pentingnya penerapan bauran pemasaran yang terdiri dari orang, proses, harga, promosi, tempat, bukti nyata, dan produk menjadi fondasi dalam pengembangan strategi pemasaran usaha (Farisi et al., 2024).

Dalam ranah implementasi kebijakan, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Indonesia merupakan bukti komitmen negara untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan di tingkat akar rumput (Zulhakim et al., 2024). Teori Implementasi Kebijakan Grindle menawarkan wawasan berharga untuk memahami kondisi dan tantangan dalam menginterpretasikan kebijakan menjadi tindakan yang berdampak. Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui kegiatan sosialisasi mengenai urgensi mempelajari keilmuan manajemen ritel, dengan sasaran utama para perangkat desa, kader

pemberdayaan masyarakat, dan calon sarjana desa di Kecamatan Citeureup. Kegiatan ini difokuskan pada pembangunan kesadaran institusional desa mengenai pentingnya sinergi keilmuan dalam mengelola sistem ekonomi pedesaan yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Diperlukan bimbingan dan bantuan bersama dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga pendidikan tinggi untuk mewujudkan hal tersebut (Handini et al., 2020).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas jajaran perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kader pemberdayaan masyarakat, serta calon penerima manfaat program Satu Desa Satu Sarjana. Metode yang diadopsi dalam kegiatan ini adalah pendekatan komunikasi edukatif partisipatif melalui bentuk sosialisasi dan forum diskusi interaktif. Seluruh rangkaian program dirancang secara sistematis pada tahun akademik 2025/2026 yang bergerak secara bertahap melalui tiga fase utama, yaitu persiapan dan diagnostik kebutuhan, pelaksanaan edukasi interaktif, serta evaluasi kualitatif-reflektif. Pada tahap awal, tim pengabdian melaksanakan koordinasi mendalam dengan pihak pemerintah kecamatan dan perwakilan perangkat desa guna menyelaraskan jadwal pelaksanaan serta mengidentifikasi permasalahan mendasar terkait pemahaman aparatur mengenai urgensi keilmuan ritel. Dalam kaitannya dengan pemetaan kebutuhan tersebut, ketepatan identifikasi ini didasarkan pada asumsi bahwa pelatihan yang ditargetkan dalam keterampilan manajemen dan keuangan secara signifikan mampu meningkatkan efektivitas operasional kelembagaan pedesaan, sekaligus membuka potensi ekonomi wilayah melalui kemitraan terintegrasi antara masyarakat, universitas, dan sektor industri (Supratiwi et al., 2025). Luaran dari pemetaan kebutuhan ini digunakan sebagai landasan kontekstual untuk menyusun draf materi sosialisasi manajemen ritel terapan yang disederhanakan agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan perangkat desa selaku pembuat kebijakan lokal.

Fase kedua merupakan tahap implementasi edukasi yang diselenggarakan secara terpusat di Aula Kecamatan Citeureup dalam waktu 1 (satu) hari. Tahapan sosialisasi ini dirancang menggunakan metode pendekatan partisipatif aktif melalui teknik ceramah, pemaparan materi inti oleh tim pengabdian, serta disusul dengan sesi diskusi tanya jawab secara terbuka bersama seluruh peserta. Pola pendekatan partisipatif ini sejalan dengan kerangka kerja penyuluhan oleh Hasanudin dan Rizky (2026) yang mengombinasikan pemaparan materi tatap muka dengan ruang diskusi interaktif guna menstimulasi pemahaman audiens secara mendalam. Dalam pelaksanaannya, materi edukasi yang dihandarkan difokuskan pada dua poin substansial, yaitu konsep dasar manajemen ritel modern dan relevansinya yang mengulas urgensi pengelolaan niaga terstruktur dalam memperkuat fondasi ekonomi pedesaan, serta formulasi pola sinergi kelembagaan yang membedah peran strategis sarjana pendamping dalam menyukseskan program kerja Satu Desa Satu Sarjana sebagai motor penggerak unit usaha desa. Melalui transmisi kedua materi utama tersebut, forum diarahkan secara komprehensif untuk membangun paradigma baru di kalangan aparatur mengenai pentingnya penguasaan ilmu ritel sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan aset ekonomi daerah.

Fase terakhir difokuskan pada evaluasi kualitatif dan refleksi umpan balik. Mengingat intervensi program ini bertumpu pada ranah sosialisasi pemikiran dan pembangunan kesadaran institusional, tolok ukur keberhasilan program tidak dinilai menggunakan instrumen statistik angka atau uji kuantitatif, melainkan dianalisis secara deskriptif. Evaluasi dilakukan secara riil berdasarkan pengamatan terhadap tingkat keterlibatan aktif peserta sepanjang forum diskusi, respons atau tanggapan balik yang diutarakan oleh perangkat desa, serta analisis kualitatif terhadap komitmen awal yang terbangun pasca-kegiatan mengenai pemanfaatan sarjana pendamping ritel. Pendekatan evaluasi kualitatif-reflektif ini serupa dengan metodologi yang diterapkan oleh Sukaris et al. (2019) yang mengukur keberhasilan penguatan kapasitas manajerial melalui indikasi pergeseran cara pandang, penguasaan pemahaman konseptual, serta dorongan motivasi internal peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat kegiatan berlangsung, suasananya ternyata cukup kondusif. Kami sengaja menggunakan pendekatan yang lebih humanis agar birokrasi desa tidak terasa kaku. Hasilnya, aparatur desa merespon dengan baik mereka terbuka dan adaptif, sejak pemaparan materi awal sampai sesi diskusi terakhir. Kesadaran kritis para perangkat desa mulai bangkit ketika mereka menyadari bahwa sektor perdagangan ritel di pedesaan selama ini berjalan tanpa sentuhan dasar-dasar keilmuan yang memadai,

sehingga potensi ekonomi lokal belum terkelola secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Nawawi et al. (2023) bahwa pejabat desa memperoleh pemahaman komprehensif tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi interaktif yang merangsang pikiran peserta.



Gambar 1. Penyampaian materi

Suasana ruang sosialisasi yang interaktif terlihat dari keseriusan para pamong desa dalam mencermati setiap poin urgensi kurikulum dan kompetensi ritel yang dipaparkan. Dokumentasi jalannya pemaparan materi dan ruang diskusi tanya jawab bersama aparatur desa di Aula Kecamatan Citeureup masing-masing disajikan pada Gambar 1. Proses penyampaian informasi yang terekam pada Gambar 1 tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi dua arah menjadi kunci utama dalam membangun kesepahaman. Melalui visualisasi proyeksi keunggulan keilmuan manajemen ritel yang ditayangkan, audiens tidak lagi memandang sektor ini secara sempit sebatas operasional toko swalayan, melainkan sebagai instrumen strategis yang melandasi tata kelola ekonomi wilayah. Menurut teori modal sosial dalam pembangunan ekonomi pedesaan oleh Woolcock dan Narayan (2000) kesepahaman konseptual antara pihak akademisi selaku pembawa pengetahuan dengan aparatur desa merupakan langkah awal dalam membangun jembatan pengikat (*bridging social capital*) yang dapat mengakselerasi program-program pemberdayaan berbasis wilayah. Peran modal sosial dalam mendorong pembangunan kawasan yang berkelanjutan juga dikonfirmasi oleh Nasihuddin et al. (2020).

Respons positif dari perangkat desa ini terlihat jelas dari tingginya antusiasme selama sesi diskusi tanya jawab mengenai konsep dasar manajemen ritel modern. Para peserta mengonfirmasi bahwa pemahaman mengenai pentingnya mempelajari ilmu manajemen ritel sangat membuka cara pandang mereka dalam melihat potensi pasar desa. Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam penguatan manajemen pemasaran terbukti dari pengetahuan dan pemahaman peserta yang meningkat, serta peserta memiliki motivasi yang kuat dalam mengelola bisnis (Sukaris et al., 2019). Aparatur desa menyadari bahwa kegagalan pengembangan unit usaha milik desa atau warung tradisional selama ini disebabkan oleh minimnya literasi dan latar belakang pendidikan di bidang manajemen tata kelola niaga. Hal ini diperkuat oleh temuan Trisnantari et al. (2023) bahwa peran lurah sebagai pemimpin program belum dimaksimalkan dan tidak semua pelaku UMKM berpartisipasi dalam mentoring secara rutin. Pentingnya latar belakang pendidikan tata kelola usaha ini ditekankan oleh Reardon et al. (2003) yang meneliti transformasi pasar ritel di negara berkembang, di mana kelemahan utama dari agen ekonomi tradisional terletak pada ketidaksiapan manajerial dalam merespons penetrasi pasar modern, sehingga pembenahan pola pikir birokrasi lokal menjadi mutlak diperlukan. Melalui sosialisasi ini, urgensi untuk menghadirkan SDM yang memiliki kompetensi ritel di tingkat desa menjadi kebutuhan yang dirasa sangat mendesak. Pengembangan SDM yang berkualitas dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kreativitas UMKM (Rosyadi et al., 2025).

Yang paling menarik, peserta mulai paham bagaimana seharusnya sinergi antara aparatur desa dan sarjana pendamping dijalankan dalam program Satu Desa Satu Sarjana. Dulu, program ini sering dianggap sekadar beban administrasi. Kini, cara pandang itu mulai berubah. Melalui pemahaman mendalam mengenai manajemen ritel, program daerah yang semula dianggap beban guna program sarjana satu desa berhasil diubah menjadi peningkatan SDM di wilayah Kecamatan Citeureup. Dengan mempelajari manajemen ritel, kehadiran sarjana pendamping bertransformasi menjadi aset strategis

yang nyata untuk menggerakkan unit usaha desa, sekaligus meningkatkan kesiapan birokrasi dalam menyerap keilmuan ritel terapan guna mendongkrak nilai ekonomis pedesaan. Hal ini sejalan dengan temuan Sukowati et al. (2023) bahwa transfer pengetahuan tentang pengemasan dan pemasaran produk dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Sinergi yang harmonis antara birokrasi desa sebagai fasilitator kebijakan dan sarjana pendamping sebagai eksekutor yang membawa bekal pendidikan manajemen ritel diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi pedesaan secara signifikan. Model kerja sama tripartit atau kemitraan ini diperkuat oleh konsep intervensi komunitas yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) mengenai tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Mereka menyatakan bahwa efektivitas program pembangunan daerah sangat bergantung pada bagaimana otoritas publik (aparatur desa) dapat memosisikan tenaga ahli (sarjana pendamping) bukan sebagai beban hierarkis, melainkan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan teknis di lapangan. Namun, penelitian Annahar et al. (2023) menemukan bahwa keberhasilan tata kelola inklusif sangat bergantung pada faktor pendukung dan tantangan di desa yang terdesentralisasi, di mana desa maju cenderung lebih mungkin mewujudkan tata kelola inklusif. Optimalisasi digital marketing juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan omzet penjualan, jangkauan pasar, dan visibilitas merek (Priono et al., 2025), meskipun terdapat hambatan seperti literasi digital rendah, kendala keuangan, infrastruktur tidak memadai, dan resistensi terhadap perubahan (Widyadana et al., 2025).

Penerimaan yang sangat baik dan umpan balik positif dari perangkat desa ini menunjukkan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan sangat kontekstual dengan kebutuhan di lapangan. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya wawasan peserta dan terstimulasinya motivasi untuk selalu berpikir inovatif dan kreatif (Baharsyah et al., 2023). Namun demikian, tim pengabdian mencatat adanya tantangan berupa kekhawatiran dari beberapa perangkat desa mengenai kesinambungan komunikasi antara aparatur lokal dengan para sarjana pendamping yang baru bertugas. Hambatan psikologis awal ini menuntut perlunya komitmen bersama dalam menyusun mekanisme koordinasi yang inklusif agar transfer ilmu keperilaku ritel dapat berjalan lancar tanpa benturan sosial. Isu resistensi psikologis dalam tata kelola organisasi pedesaan ini senada dengan kajian pendorong inovasi pedesaan oleh Bosworth et al. (2016), yang menyimpulkan bahwa pengenalan paradigma baru di tingkat desa memerlukan fase asimilasi sosial agar relasi kuasa antara birokrat lokal dan pendatang baru tidak menciptakan hambatan fungsional dalam eksekusi program. Pemanfaatan potensi lokal melalui inovasi dan pemasaran hasil olahan juga menjadi strategi penting untuk mendukung perekonomian desa (Lestari et al., 2024), termasuk inovasi teknologi pengolahan produk pangan bernilai tambah (Sulistiyawati et al., 2025).

Peluang keberlanjutan program ini sangat terbuka lebar mengingat tingginya antusiasme pemerintah desa di Kecamatan Citeureup. Sebagai langkah konkrit pasca-sosialisasi ini, tercapai kesepakatan pembentukan komitmen bersama antara pihak kecamatan, desa, dan tim pengabdian untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan manajemen ritel. Komitmen ini akan mengawal pemanfaatan tenaga sarjana pendamping desa agar secara khusus mengawal penguatan konsep dasar manajemen ritel di sektor usaha mikro desa, sehingga relevansi pendidikan ritel yang disosialisasikan dapat mewujudkan nyata dalam peningkatan daya saing ekonomi pedesaan di Kabupaten Bogor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi ini berhasil mengubah cara pandang birokrasi desa di Kecamatan Citeureup tentang tata kelola ekonomi pedesaan, terutama dalam hal pentingnya pendidikan manajemen ritel untuk mendukung program Satu Sarjana Satu Desa. Respons adaptif dan umpan balik yang sangat positif dari perangkat desa menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun komitmen pembinaan SDM serta mengintegrasikan peran sarjana pendamping dalam program Satu Desa Satu Sarjana. Melalui implementasi keilmuan manajemen ritel, program daerah ini tidak lagi menjadi beban birokrasi, melainkan bertransformasi menjadi aset strategis yang meningkatkan kesiapan perangkat desa di Kecamatan Citeureup dalam menyerap ilmu ritel terapan demi mendongkrak nilai ekonomis pedesaan. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparatur desa, dan perguruan tinggi dalam memberdayakan masyarakat desa melalui pendekatan pendidikan manajemen modern. Disarankan bagi program pengabdian masyarakat selanjutnya untuk menindaklanjuti komitmen ini ke tahap pendampingan intensif yang memfasilitasi integrasi kerja antara aparatur desa

dan sarjana pendamping secara berkala demi mewujudkan kemandirian ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada pihak Lembaga Kecamatan Citeureup serta seluruh jajaran perangkat desa di bawah naungan Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang telah memberikan izin, memfasilitasi tempat, serta berkontribusi secara aktif dan penuh dedikasi dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi ini. Dukungan penuh dan komitmen yang ditunjukkan oleh segenap mitra di lapangan merupakan energi utama bagi keberhasilan hilirisasi program penguatan ekonomi pedesaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2025). Learning Hot Spots And Smart Village Governance: Innovation Pathways for Sustainable Rural Development. *Journal Publicuho*, 8(4), 3067-3078. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.1075>
- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8616. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Baharsyah, S., Nurhasan, N., & Hasanudin, H. (2023). Pelatihan manajemen pemasaran untuk peningkatan kualitas pelayanan dan promosi pada usaha mikro kecil dan menengah. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 298-307. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3180>
- Bosworth, G., Annibal, I., Carroll, T., Price, L., Sellick, J., & Shepherd, J. (2016). Empowering local action through neo-endogenous development; The case of LEADER in England. *Sociologia Ruralis*, 56(3), 427-449.
- Farisi, H., Yuliana, A., Sukoco, H., & Andini, M. (2024). Optimalisasi strategi pemasaran pada bengkel motor di Purwokerto. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(04), 1256–1261.
- Fauzan, I., Susilo, A. T., & Utomo, A. (2020). The Effect of One Village One Product Movement on the Empowerment of Micro and Medium Enterprises (MSMEs). <https://doi.org/10.7176/RHSS/10-24-04>
- Fridayani, H. D., Atmojo, M. E., Hakim, M. L., & Mahendro, A. B. (2024). The social savvy entrepreneur: Lean start-up branding and social media for MSMEs. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 9(2), 445–458. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v9i2.12715>
- Handini, S., Sukesu, S., & Astuti, H. K. (2020). Empowering the communities in the coastal areas of Lamongan East Java to improve their welfare. *Research, Society and Development*, 9(5), e04952745-e04952745. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i5.2745>
- Handoyo, F., Hidayatina, A., & Purwanto, P. (2021). The effect of rural development on poverty gap, poverty severity and local economic growth in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 369-381. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.369-381>
- Hasanudin, H., & Rizky, R. M. (2026). Penyuluhan UMKM dalam upaya memenangkan persaingan pasar: Penggunaan kemasan berbasis ekonomi hijau. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 55–61. <https://doi.org/10.31949/jb.v7i1.16386>
- Hasibuan, R. R., Afifah, H., Purnawati, E., & Farisi, H. (2022). *Manajemen pemasaran*. Tiga Cakrawala.
- Lean, F., Fany, S., & Muhammad, T. (2024). Transformasi UMKM Kulon Progo: Langkah Strategis Menghadapi Dominasi Pasar Modern melalui Kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA). *Jurnal Sudut Pandang*, 4(6), 1-18. <https://doi.org/10.55314/jsp.v4i6.766>
- Lestari, H. A., Erminawati, E., Farisi, H., Aini, N., Astuti, S. D., & Istiqomah, I. (2024). Pembuatan susu dan yoghurt jagung sebagai salah satu cara pemanfaatan potensi lokal di Desa Limpakuwus. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 5(02), 141-147. <https://doi.org/10.24967/jams.v5i02.3601>
- Maryanti, E., Biduri, S., Sari, H. M. K., & Fauziah, L. P. (2023). Enhancing local SMEs through village-owned enterprises: A case study in Indonesia. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 14(2). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i2.963>

- Maulana, H., Saputro, M. B., Sholahuddin, Y., & Alfaridzi, M. R. (2025). Inovasi Berkelanjutan: Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Produk Lokal di Desa Karangwaluh, Ponorogo. *Abdimas Universal*, 7(2), 449–458. <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v7i2.2689>
- Mukti, T. A., Nugroho, B. W., & Munawar, S. (2023, December). The empowerment of economic community through training of networking store management in Kretek District, Bantul. In *Proceeding International Conference of Community Service* (Vol. 1, No. 2). <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i2.173>
- Nasihuddin, A. A., Pamuji, K., Supriyanto, Rosyadi, S., & Ahmad, A. A. (2020, March). The role of social capital in promoting sustainable rural development area in Banyumas Regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 448, No. 1, p. 012067). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/448/1/012067>
- Nawawi, J., Anwar, S. T., Kasogi, A., Muhajir, A., Ilyas, S., Arisnawawi, A., & Saifuddin, S. (2023). Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. *JURNAL EKOLOGI BIROKRASI*, 11(1), 34–42. <https://doi.org/10.31957/jeb.v11i1.2887>
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2025, Oktober 7). *Bangun SDM unggul, Bupati Bogor canangkan program Satu Desa Satu Sarjana*. Portal Resmi Kabupaten Bogor. <https://setda.bogorkab.go.id/berita/seputar-opd/bangun-sdm-unggul-bupati-bogor-canangkan-program-satu-desa-satu-sarjana>
- Priono, I. E., Farisi, H., & Yuliana, A. (2025). Optimalisasi digital marketing pada UMKM lokal Banyumas. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 487–498. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4715>
- Reardon, T., Timmer, C. P., Barrett, C. B., & Berdegue, J. A. (2003). The rise of supermarkets in Africa, Asia, and Latin America. *American Journal of Agricultural Economics*, 85(5), 1140–1146.
- Rosyadi, M. A., Farisi, H., & Safitri, A. (2025). Pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengembangan UMKM pariwisata di Purwokerto: Tantangan dan strategi untuk era digital. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(2), 521–533. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i2.133>
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>
- Satoto, S., Nuriyatman, E., Mushawirya, R., Mujib, M. M., & Haq, M. I. (2024). Revitalization of village-owned enterprises to strengthen the community economy in Indonesia: Between policy and prosperity. *Jambe Law Journal*, 7(2), 509–537. <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.364>
- Sugianto, S., & Siagian, S. B. U. (2023). Governance budget of the APBN source village in order to make a rural development in Nawa Cita perspective. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 2(4), 289–300. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i4.58>
- Sukaris, S., Budiyanos, B., & Alkusani, A. (2019, July). Strengthening marketing access in supporting the management of productive economic business in the village community of Sambipondok Sidayu Gresik. In *International Conference on Innovation in Research (ICIIR 2018)–Section: Economics and Management Science* (pp. 196–199). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iciir-18.2019.37>
- Sukowati, D., Farisi, H., & Yuwono, T. A. (2023). Peluang bisnis limbah bonggol jagung menjadi briket pada kelompok PKK Desa Mentasan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 3(3), 142–148. <https://doi.org/10.31004/abdira.v3i3.343>
- Sulistiyawati, I., Farisi, H., & Karseno, K. (2025). Inovasi teknologi modern pengolahan sirup buah mangrove solusi strategis mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(4), 1199–1210. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i4.24173>
- Supratiwi, W., Agustia, D., Soewarno, N., Isnalita, Iswati, S., Tjaraka, H., ... Izzato Millati. (2025). Enhancing the Role of Cooperatives in Achieving Community Welfare in Tunah Village, Semanding Sub-district, Tuban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 349–355. <https://doi.org/10.32815/jpm.v6i1.2531>

- Syahza, A., Rosnita, Suwondo, & Nasrul, B. (2013). Potential oil palm industry development in Riau. *International Research Journal of Business Studies*, 6(2), 133-147. <https://doi.org/10.21632/irjbs.6.2.133-147>
- Trisnantari, S. A., Susilastuti, D. H., & Putri, T. W. S. (2023). Collaborative governance process in MSMEs empowerment through Desa-Preneur program in Sidoarum Village, Yogyakarta. *Populasi*, 31(2), 90-111.
- Widyadana, K. A., Farisi, H., & Safitri, A. (2025). Transformasi digital UMKM Banyumas: Identifikasi hambatan dan rekomendasi solusi. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(3), 3054-3062.
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225-249.
- Zulhakim, A. A., S., S., B., B., N., N., & Susanti, I. (2024). Context analysis of the implementation of village community development and empowerment programs. *KnE Social Sciences*, 9(7), 412–430. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15520>